

**PEMAHAMAN REMAJA TENTANG KENAKALAN
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENGATASI KENAKALAN REMAJA**

(Studi Kasus di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar)



Oleh :

Wahidin
P1602207508

Program Pasca Sarjana
Jurusan Sosiologi Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Sosial
Universitas Hasanuddin
2012

ABSTRAK

WAHIDIN, *Pemahaman Remaja tentang Kenakalan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Madya Makassar)* dibimbing oleh **Dr. Saifullah Cangara. M.Si** dan **Prof. Drs. H.A.R. Hafidz, MS)**

Penelitian ini bertujuan mendapatkan data tentang (1) menganalisis pemahaman individu remaja tentang kenakalan remaja di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar, (2) menganalisis pemahaman individu orang tua, guru sekolah, tokoh masyarakat, aparat kelurahan dan keamanan tentang kenakalan remaja serta bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Madya Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk memahami realitas sosial dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi diharapkan mampu menggali kondisi sosial kebiasaan dan ungkapan sehari-hari dikalangan remaja nakal terhadap dirinya sendiri, keluarga, tokoh masyarakat, guru sekolah, aparat kelurahan dan keamanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Madya Makassar belum maksimal hal ini disebabkan karena organisasi kepemudaan tidak berjalan sesuai dengan baik. Oleh karena itu perlunya adanya suatu pengembangan model rancangan partisipasi masyarakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan kerja sama lintas sektoral, maka akan tercipta suasana kebersamaan dalam membangun kenyamanan dan keamanan masyarakat di Kelurahan Tamparang Keke.

ABSTRACT

WAHIDIN, *Understanding Juvenile Delinquency and Community Participation for solving Juvenile Delinquency" Case Study in Urban Village District Keke Tamparang Mamajang Makassar Municipality".* (Guided by Dr. Saifullah Cangara. M.Si and Prof. Drs. H. A. R. Hafidz, MS)

This study aims to obtain data on (1) analyze the individual understanding of the juvenile delinquency in the Village Keke Tamparang Mamajang District Macassar City, (2) analyze the individual understanding of parents, school teachers, community leaders, village officials and security of juvenile delinquency and other forms of empowerment and community participation.

The research was conducted in the Village Tamparang Keke Mamajang District of Macassar city. The method used in this study is a qualitative method for understanding social reality and depth interviews are featured very prominently in the collection of data. Observations are expected to explore the social conditions and habits of everyday expressions among young people to himself, family, community leaders, school teachers, administrative and security apparatus.

The results showed that the empowerment and community participation in dealing with juvenile delinquency in the Village Tamparang Keke Mamajang District of Makassar city is not maximized and this is because youth organizations do not go as well. Hence the need for the existence of a development model of community participation plan that involves all elements of society and cross-sectoral cooperation, it will create an atmosphere of togetherness in building comfort and safety of the community in the Village Tamparang Keke.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kenakalan Anak dan Remaja	6
B. Kenakalan Remaja sebagai Masalah Sosial	12
C. Partisipasi Masyarakat	24
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Kualitatif	37
B. Lokasi Penelitian	41
C. Penentuan Subyek Penelitian	42
D. Analisa Data	43

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
	A. Sejarah Singkat Kelurahan TamparangKeke	45
	B. Keadaan Geografis	46
	C. Demografi	46
	D. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya	48
BAB V	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	53
	A. Keberadaan Remaja Nakal di Kelurahan TamparangKeke	53
	B. Pemahaman Remaja, Orang Tua, Guru dan Masyarakat Aparat Kelurahan dan Keamanan Tentang Kenakalan Remaja	54
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Rekomendasi	83
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Penduduk Kelurahan Tamparang Keke Menurut Usia Tahun 2009	47
Tabel 2. Distribusi Penduduk Kelurahan Tamparang Keke Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2009	48
Tabel 3. Distribusi Penduduk Kelurahan Tamparang Keke Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009	50
Tabel 4. Data Organisasi Sosial Kelurahan Tamparang Keke	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan dikalangan anak remaja, merupakan masalah sosial yang tak dapat dipungkiri, suatu masalah sosial yang sangat memerlukan perhatian karena sungguh mengkhawatirkan, dikatakan mengkhawatirkan karena banyak dari kasus kenakalan remaja itu telah menjurus kearah kejahatan. Anak remaja melakukan tindakan di luar batas, menyimpang dari norma dan tata tertib masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu keamanannya dan tidak tenang serta selalu merasa waspada. Problem kemerosotan moral akhir-akhir ini menjangkiti sebahagian generasi muda. Gejala kemerosotan moral antara lain diindikasikan merebaknya kasus penggunaan narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, kekerasan dan aneka perilaku tidak terpuji lainnya. Dilain pihak, tak sedikit generasi muda yang gagal menampilkan akhlak terpuji (*ahlaqmahmuda*) sesuai harapan orang tua, kesopanan sifat ramah, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial dan sebagainya yang merupakan jati diri bangsa berabad-abad seolah-olah kurang begitu terlihat secara kuat dalam diri mereka.

Pelanggaran-pelanggaran aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat selalu terjadi di beberapa tempat sehingga remaja nakal itu selalu berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan setempat. Surat kabar, majalah, dan media televisi, sering memuat peristiwa atas kasus-kasus remaja semacam itu, diantaranya sudah tergolong tindakan kriminal seperti

perkelahian kelompok yang dimulai dengan perorangan kemudian menjadi perkelahian kelompok, penodongan, pencurian, kebut-kebutan, mabuk-mabukan, judi, melempari mobil yang lewat sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan. Demikian pula keterlibatan remaja dalam penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya yang sangat membahayakan generasi muda, semuanya turut mengancam dan menggelisahkan para orang tua dan masyarakat.

Beberapa tahun belakangan ini masalah kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bahkan telah dan sering dibicarakan dalam berbagai seminar dan menjadi tema diskusi serta sasaran perhatian penegak hukum. Semuanya dimaksudkan untuk pembinaan generasi muda yang lebih baik di masa mendatang.

Saat ini, tidak lagi mengagetkan jika kita membaca berita di media cetak dan melihat peristiwa perkelahian melalui televisi sepertinya perkelahian remaja itu sudah merupakan bagian dari kehidupan para remaja. Apakah perkelahian antar remaja yang kadang-kadang menggunakan seragam sekolah atau yang tergabung dalam “gang-gang” tertentu, sudah tidak menjadi masalah lagi, bahkan yang lebih parah lagi tidak jarang terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, sehingga beberapa kali peristiwa mengakibatkan korban meninggal. Ironisnya karena dalam wilayah tertentu sering berulang perkelahian yang membawa maut. Padahal sering penyebab perkelahian itu hal-hal yang sepele, tidak pantas merengguk korban nyawa, terlalu mahal persoalannya untuk dibayar dengan nyawa seorang remaja.

Gambaran buram dan potret kenakalan remaja tersebut, kadang sukar di pahami seperti kasus perkelahian yang terjadi di kota-kota besar antar sekolah yang merusak bis kota yang sedang berjalan dengan melempar batu atau memukulnya dengan balok kayu, kemudian mereka lari. Bahkan sering juga remaja itu memeras remaja sekolah lain, mabuk-mabukan, ngebut di jalan mencoret-coret tembok dan pagar suka menantang guru/orang tua, suka melawan dan lain-lain sebagainya.

Dari beberapa bentuk kenakalan remaja seperti yang di kemukakan diatas sebetulnya dapat di golongankan dalam 4 jenis, yaitu :

1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan.
2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, seperti pengrusakan, pencurian, pencopetan dan penodongan.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, kumpul kebo dan lain-lain.
4. Kenakalan yang melawan status, mengingkari kasus pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan minggat dari rumah atau melawan orang tua (Sarlito, 1989:85).

Pada usia remaja perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terperinci. Akan tetapi kalau remaja ini

dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas penegak hukum di masyarakat.

Atas dasar fenomena remaja yang diuraikan diatas ternyata jika dicermati banyak faktor yang saling berhubungan sehingga untuk penyelesaiannya perlu kerja sama dan sinergi dari perbagai pihak dari pemerintah diperlukan adanya payung yang mampu meredam konflik antara remaja dan meminimalkan jatuhnya korban tindak kekerasan. Selain itu, lembaga-lembaga yang berkepentingan perlu diberi kesempatan untuk ikut mengupayakannya. Yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat. Selama ini sikap peduli atau perhatian dari sebahagian masyarakat terhadap kasus-kasus kenakalan remaja masih relatif rendah hal ini karena pemahaman masyarakat berbeda, bahkan ada yang mendukung kelompok tertentu untuk membiarkan aksi kekerasan terjadi.

Pemahaman yang pertama, di masyarakat akan tindak kekerasan yang dilakukan antar kelompok remaja, menganggap hal biasa karena sering terjadi. Pemahaman yang lain adalah masyarakat adalah sikap masa bodoh dan tidak ikut campur karena takut akan akibatnya terhadap diri mereka.

Dengan melihat ulasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat belum mempunyai konsep yang tegas dalam menyikapi tindakan kenakalan yang dilakukan oleh kelompok remaja. Selain itu, belum memadainya kepedulian atau perhatian masyarakat atas tindak kekerasan antara kelompok remaja dan berakibat pada kurangnya partisipasi untuk menangani masalah kenakalan remaja.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman individu remaja tentang kenakalan remaja di Kelurahan Tamparang Keke?
2. Bagaimana pemahaman orang tua, guru sekolah, tokoh masyarakat, aparat kelurahan dan keamanan tentang kenakalan remaja serta bentuk pemberdayaan remaja dan partisipasi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pemahaman individu remaja tentang kenakalan remaja di Kelurahan Tamparang Keke.
2. Menganalisa pemahaman orang tua, guru sekolah, tokoh masyarakat, aparat kelurahan dan keamanan tentang kenakalan remaja serta bentuk pemberdayaan remaja dan partisipasi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Kenakalan Anak dan Remaja

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Di sisi berkehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak, dimana Komisi Hak Anak memfokuskan perhatian pada hak anak dan keluarga, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Diantara hak-hak yang disebutkan dalam Konvensi tersebut adalah hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang maksimal dengan penekanan pada kepentingan terbaik bagi setiap anak.

Anak diasuh dan dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan masing-masing (lingkungan sepermainan dan lingkungan sekolah) sangat menentukan perkembangan kehidupan anak. Apabila keluarga dan lingkungan sosial anak kurang kondusif bagi perkembangan anak, maka anak dan remaja dapat menyebabkan berperilaku menyimpang pada anak dari norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang biasa di sebut 'kenakalan anak dan remaja.

Anak dan remaja dilihat dari segi perkembangannya terdapat perbedaan pada tingkat usia. Dalam kamus psikologi disebutkan bahwa anak adalah seorang anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut, bisa berarti seorang individu diantara kelahiran dan masa pubertas atau seorang individu diantara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil dan masa pubertas). (Chaplin, 1981:83). Dalam masa perkembangannya seorang anak dapat dibedakan antara masa anak awal dan masa anak tengah. Masa anak awal (*early childhood*) adalah masa perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi kira-kira usia 5 atau 6 tahun; kadang-kadang masa perkembangan ini disebut masa prasekolah. Masa anak tengah (*middle and late childhood*) dan akhir adalah masa perkembangan yang berlangsung dari kira-kira usia 6 tahun sampai 11 tahun; kadang-kadang masa perkembangan ini disebut masa sekolah dasar (Santrock, 2006:26)

Selama masa kanak-kanak awal, anak kecil belajar untuk menjadi lebih mandiri dan bisa merawat dirinya, mengembangkan sekolah (mengikuti instruksi, mengenal abjad) dan melewatkan banyak waktunya untuk bermain dengan teman-temannya. Sedangkan masa anak tengah dan akhir, mulai menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung dan mereka secara formal juga dikenalkan dengan dunia yang lebih luas dengan budayannya. Prestasi yang menjadi tema yang lebih sentral dalam hidup anak dan kontrol diri meningkat.

Definisi tentang masa remaja memerlukan pertimbangan tentang usia dan pengaruh faktor sosial dan sejarah. Santrock (2006:26) mendefinisikan

remaja (*Adoleh Scence*) sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial – emosional. Walaupun situasi budaya dan sejarah sangat berpengaruh untuk menentukan rentang usia remaja, masa remaja dimulai kira-kira usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir antara usia 18 dan 22 tahun. Perubahan biologis, kognitif dan sosial – emosional yang terjadi dari perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak kemandirian.

Sejalan denganhal tersebut, Soerjono Soekanto (1990:51), membedakan golongan remaja: gadis-wanita 13 sampai 17 tahun dan inipun sangat tergantung pada kematangan secara seksual sehingga penyimpangan secara konsisten pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja berusia dari 14 sampai 18 tahun lazim disebut golongan muda atau pemuda – pemuda. Sikap tindak tanduk mereka rata-rata mendekati pola sikap tindak orang dewasa. Walaupun dari sudut perkembangan mentalnya belum sepenuhnya demikian. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat.

Hakekat masa perkembangan proses anak-anak kemas remaja merupakan pola gerakan atau perubahan dari konsepsi dan berlangsung secara terus menerus sepanjang rentang hidup manusia. Proses perubahan perkembangan tersebut dapat dilihat dari aspek biologis, kognitif dan sosial – emosional. Aspek biologis nampak pada perkembangan fisik, perubahan aspek kognitif mencakup pikiran, intelegensia dan bahasa. Sedangkan proses perkembangan sosial – emosional menyangkut perubahan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam emosi, kepribadian dan dalam konteks sosial.

Dalam mengarahkan perkembangan remaja diperlukan proses pembelajaran sosial kognitif yang memberikan penekanan pada peranan faktor lingkungan dan kesenjangan antara pemikiran moral dan tindakan moral. Selain itu juga menekankan bahwa tingkah laku moral tergantung pada situasinya. Dengan demikian faktor situasi sosial dalam proses sosialisasi dalam keluarga, kelompok dan masyarakat tentang norma-norma kehidupan yang turut memberikan kontribusi dalam mengendalikan perilaku anak dan remaja. Pembelajaran sosial kognitif menyangkut sosialisasi perkembangan moral remaja memberikan penekanan pada adanya perbedaan antara kompetensi moral remaja yaitu kemampuan untuk melakukan tingkah laku moral dan performa moral serta tingkah laku yang dimunculkan pada situasi tertentu. Kompetensi atau keahlian tergantung pada proses kognitif – sensori.

Menurut Albert Bandura (1991) yang dikutip oleh Santrock (2006:451) kompetensi remaja yang dimaksud adalah apa yang dilakukan remaja, apa yang mereka ketahui, keterampilan mereka, kesadaran mereka akan aturan dan peraturan moral dan kemampuan mereka untuk membentuk tingkah laku. Performa moral remaja, atau tingkah laku ditentukan oleh motivasi dan reward serta insentif yang diperoleh bila melakukan suatu tindakan moral tertentu. Seringkali laki-laki tampak kurang matang untuk usianya dibandingkan perempuan. Namun, dan adanya status yang lebih matang dirumah dan sekolah biasanya remaja laki-laki cepat menyesuaikan diri dan menunjukkan perilaku yang lebih matang, yang sangat berbeda dengan perilaku remaja yang lebih muda.

Pelabelan remaja sering pula disebut 'anak belasan tahun atau Anak Baru Gede' sampai ia mencapai usia 21 tahun' namun istilah belasan tahun yang secara populer dihubungkan dengan pola perilaku khas remaja muda, jarang dikenakan pada remaja yang lebih tua biasanya di sebut pemuda atau pemudi, atau malahan disebut 'kaulamuda', yang menunjukkan bahwa masyarakat belum melihat adanya perilaku yang matang selama masa awal remaja.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, bukan 21 tahun seperti sebelumnya. Perpanjangan masa remaja setelah individu matang secara seksual dan sebelum di beri hak serta tanggung jawab orang dewasa mengakibatkan kesenjangan antara apa yang secara populer dianggap budaya remaja dan budaya dewasa. Budaya kaulamuda menekankan kesegaran dan kelengahan tanggung jawab orang dewasa. Budaya ini memiliki hirarki sosialnya sendiri, gaya penampilan sendiri nilai-nilai dan norma perilakunya sendiri.

Atas gaya penampilan, nilai-nilai norma-norma perilaku kaulamuda tersebut Hurlock (1997:207-8) merumuskan ciri-ciri remaja sebagai berikut:

1. Masa remaja sebagai priode penting, priode ini merupakan akibat perkembangan fisik dan psikologis. Perkembangan fisik yang cepat disertai cepatnya perkembangan mental terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan itu memerlukan penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru;

2. Masa remaja sebagai periode peralihan, periode ini adalah peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, apa yang telah terjadi sebelum meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang pada periode ini individu tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan;
3. Masa remaja sebagai periode perubahan, tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ada lima perubahan yang hampir sama bersifat universal; (1) meningginya emosi, (2) keadaan perubahan tubuh, minat peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan, (3) masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan sulit diselesaikan dibanding masalah yang dihadapi sebelumnya, (4) berubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga berubah, (5) sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan.
4. Masa remaja sebagai usia bermasalah; masalah remaja masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat dua alasan yaitu: (1) sepanjang masa kanak-kanak masalah anak-anak sebagian diselesaikan oleh orang tua dan guru, (2) para masa remaja merasa diri mandiri sehingga, ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru;
5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas; masa ini membandingkan diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar dari pada individualitas. Mereka mulai mendambakan identitas

diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya;

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan; masa dimana remaja menerima stereotipe adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai pandangan yang buruk tentang remaja sehingga peralihan menjadi dewasa sulit. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan antara anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak;
7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis; remaja pada masa ini melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana ia inginkan dan sebagai mana adanya, terlebih dalam hal cita-cita yang tidak realistis, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi keluarga dan teman-temannya sehingga menyebabkan meningginya emosi;
8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa; masa ini remaja semakin mendekati usia kematangan, remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotipe belasan tahun dan untuk memberi kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa maka remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan orang dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka menganggap bahwa perilaku mereka akan memberikan citra yang mereka inginkan.

B. Kenakalan Remaja sebagai Masalah Sosial

Berbagai kasus kenakalan remaja yang terjadi menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat, timbulnya masalah yang lebih rumit dan

tampaknya semakin sering terjadi. Demikian pula laporan statistik mengenai tingkat kejahatan, merupakan gambaran yang cukup meyakinkan dan hal itu pula dapat memberikan informasi betapa kejahatan itu sudah begitu meluas. Tampaknya masalah kenakalan remaja dan kejahatan, bukan lagi bersifat lokal tetapi sudah meluas menjadi masalah sosial dan nasional. Bila mana masalah kenakalan remaja ini semakin meningkat dan orang tua, masyarakat serta lembaga-lembaga yang menangani kenakalan remaja tidak mampu mencegah dan mengendalikannya maka kejahatan itu semakin meningkat dan dikhawatirkan dapat menjadi semacam kejahatan ala mafia sebagai mana yang terjadi di negara-negara lain.

Istilah kenakalan remaja sering disebut '*juvenile delinquency*'. *Juvenile* artinya muda, atau belum dewasa dan *delinquency* diartikan kelalaian atau kealpaan (Soerjono Soekanto, 1981:20). Jadi kedua kata itu jika digabungkan diartikan kenakalan remaja. Dapat juga diartikan sebagai kejahatan bila mana tindakan sudah mengarah pada kejahatan atau kriminal. Kata *delinquency* mempunyai pengertian yang cukup rumit karena dapat diartikan berbeda dan selalu didasarkan atas persepsi dan pandangan yang berbeda.

Proses perkembangan selanjutnya dari masa akhir anak ke masa remaja sering disebut adolescence. Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata *adolescere* (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang berarti 'tumbuh' atau tumbuh menjadi dewasa. Definisi tentang remaja memerlukan pertimbangan social dan sejarah. Istilah *adolescence* mempunyai arti yang luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini

diungkap oleh Piaget yang dikutip oleh Hurlock (1997:206) dengan menyatakan :

”Secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya masalah hak. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang khas dari cara berfikir remaja ini menunginkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari priode perkembangan ini”.

Sunyoto Usman (2004, 2004; 12), menggambarkan mencuatnya kenakalan anak dan remaja dengan analisis yang berskala makro dan analisis yang bersifat tidak terlalu makro. Analisis makro berhubungan dengan akses kebudayaan barat. Kebudayaan moderen memang diakui telah membawah kemajuan ekonomi yang hebat, terutama atas keperkasaannya dalam meniupkan rasionalitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun bagi penganut analisis ini, bersamaan dengan itu kebudayaan moderen juga menebarkan virus yang merusak dan menghancurkan dan kemapanan dan keluhuran nilai-nilai timur. Kebudayaan moderen dalam pandangan ini, identik dengan kebobrokan mesyarakat barat seperti tampak dalam celah hidup mereka yang acak-acakan penuh dengan seks dan kekerasan, kental dengan sikap individualisme dan anarkis yang tidak peduli pada sesama manusia.

Analisis yang bersifat tidak terlalu makro berhubungan dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, dasar asumsinya adalah bahwa kedua macam lingkungan itu secara sosiologis, melahirkan bentuk-bentuk

interaksi sosial tertentu yang dapat membuat sebagian gagal beradaptasi dengan dampak perubahan sosial yang berlangsung sangat pesat. Dalam perkembangan sekarang, keluarga semakin sulit diharapkan untuk melakukan fungsi sosialisasi, terutama karena anggota keluarga lebih sering mencari organisasi sosial sebagai acuanya dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Dalam kondisi demikian, sebagian anak bisa gagal beradaptasi dengan perubahan sosial yang pesat dan oleh karenanya menjadi anak nakal.

Sementara itu, lingkungan sekolahpun menghadapi banyak persoalan dalam hubungannya dengan pembiayaan perkembangan anak. Dalam usaha untuk menyongsong perkembangan pengetahuan dan teknologi, duniapendidikan berkembang dengan amat pesat sehingga kegiatan yang dilakukan sangat padat. Dalam kondisi semacam ini dapat membawa sebagian siswa terpinggirkan dari proses kegiatan belajar. Apa yang mereka inginkan tidak ditemukan secara utuh dalam kegiatan di kelas. Akibatnya mereka gagal dalam beradaptasi dan berusaha mencari kompensasi di lingkungan di luar sekolah, dan kondisi semacam ini amat potensial menjadi anak nakal.

Geraham (dalam Sarlito Wirawan, 1994; 21) membagi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu faktor lingkungan dan faktor pribadi.

1. Faktor lingkungan :

- a. Mal nutrisi (kekurangan gizi)
- b. Kemiskinan di kota-kota besar
- c. Gangguan lingkungan (polusi, Kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain-lain).

- d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang dan lain-lain).
- e. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, factor kurikulum, dan lain-lain).
- f. Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain).
- g. Gangguan pada dalam pengasuhan oleh keluarga :
 - 1) Kematian orang tua
 - 2) Orang tua sakit berat atau cacat
 - 3) Hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis
 - 4) Orang tua sakit jiwa
 - 5) Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.

2. Faktor pribadi :

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi tempramen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain).
- b. Cacat tubuh.
- c. Ketidakmampuan menyesuaikan diri.

Dari faktor penyebab kenakalan remaja tersebut diatas, dipandang dari sisi pelaku kenakalan akan merugikan dirinya sendiri terutama untuk masa depannya, dan bila dipandang dari sisi masyarakat perilaku kenakalan akan dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Proses perubahan sosial yang begitu cepat akibat kemajuan teknologi industri, di samping membawa kemajuan dan peningkatan masyarakat, juga menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan. Suatu masyarakat yang

mengalami perubahan pasti melahirkan masalah (Horton dan Hunt, 1984 : 237). Hal ini terjadi karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri mengalami perubahan nilai dan norma masyarakat dimana kondisi lama tidak lagi dapat diterima, misalnya kemiskinan dengan berbagai implikasinya seperti kenakalan remaja, tindak kekerasan dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah sosial merupakan konsekuensi perubahan sosial.

Perubahan sosial akan menyentuh nilai-nilai dan norma kehidupan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai merupakan dasar dalam menyusun norma-norma masyarakat yang menjadi aturan untuk dipedomani dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Budaya merupakan kerangka acuan bagi masyarakat pendukungnya berupa kebenaran, kebajikan dan sebagainya. Sedangkan penjabaran nilai-nilai tersebut dilakukan melalui perwujudan norma-norma yang selanjutnya dijadikan tolak ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat. Nilai keadilan diwujudkan melalui hukum dan sistem peradilan, nilai kesusilaan dinyatakan melalui berbagai tata krama, nilai religius diungkapkan melalui berbagai norma-norma agama. (Sukatmi Susantina, 2001: 8).

Munculnya dan meningkatnya masalah remaja yang berperilaku nakal tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma keluarga dan masyarakat. Kadang perubahan itu bertentangan, baik dalam tingkah laku dan pola hidup, juga kadang tidak sesuai dengan alam remaja dan alam dewasa sehingga menunjukkan sikap perlawanan terhadap aturan dan norma-norma keluarga. Acuan remaja adalah keadaan sekarang dan waktu yang akan datang,

sebaliknya orang tua cenderung melihat keadaan sekarang dari pengalaman masa lalu (Soejidto, 1986 : 53). Adakalanya kondisi yang demikian antara anak remaja dengan orang dewasa/orang tua, selalu berbeda pandangan dan saling menyalahkan satu sama lain. Akibatnya anak mencoba mencari teman kelompok sebaya yang dapat mengerti dan memahami perasaannya. Nilai penting dan pengaruh dari kelompok rujukan yang relevan mempunyai arti bagi pola-pola aktifitas dan haran ego dalam orientasi hariannya. (Burkart Hozner 1989 : 194)

Dalam perperstif sosiologi Waine Parson (2006) menyatakan terdapat dua sumber pendekatan studi problem sosial yang mengacu pada kebijakan yakni pertama, pendekatan positivis/fungsionalis yang memandang problem pada dasarnya adalah disfungsi dalam pelaksanaan fungsi masyarakat sebagai suatu sistem. Problem sosial sebagai fakta-fakta yang mesti di ukur dan fakta itu mengandung suatu fungsionalitas untuk mempertahankan masyarakat. Ilmu sosial dalam pendekatan ini berperan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang disfungsional bagi masyarakat, mengembangkan pengetahuan tentang problem dan menganalisis sebab-sebabnya serta menawarkan cara pemulihannya. Kedua, pendekatan fenomenologis yang salah satunya adalah aliran interaksi simbolik yang memandang problem pada dasarnya adalah konstkruksi sosial subjektif. Disini peran ilmu sosial adalah mengklarifikasi definisi dan asumsi, menunjukkan definisi mana yang berlaku, sudut pandang alternatif apa yang ada dan mengidentifikasi poin-poin intervensi.

Pendekatan positivistis/fungsionalis sangat dipengaruhi oleh Durkheim dalam menganalisis problem sosial. Problem sosial memerlukan bentuk analisis yang baik dan bisa menghasilkan kontrol yang efektif terhadap penyimpangan perilaku kemudian dua antropolog yakni Margaret Mead dan Bronislow Malinowski menekankan bahwa individu adalah produk dari budaya masyarakat, bukan produk biologis dan psikologis. Masyarakat harus dipahami sebagai sistem yang tak berubah dan mampu memelihara diri sendiri. Problem dalam pengertian ini adalah produk dari sistem itu beroperasi dan cara kultur membingkai dan mengkondisikan realitas bagi individu. Selanjutnya Talcott Parsons menyatakan bahwa problem sosial merupakan penyuaian dan kemungkinan disfungsi dalam sistem sosial. Tokoh utama dalam pendekatan fungsional terhadap problem sosial yaitu Robert K Merton dan John Nisbet (1961) memandang bahwa problema memiliki dimensi subjektif dan objektif. Problem sosial, sebagai disorganisasi sosial (kekurangan dalam memenuhi satu atau lebih persyaratan sosial dari sistem dan perilaku menyimpang atau penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah diterima dan dilembagakan).

Pendekatan interaksi simbolik di mulai dari Richard Fuller yang menyatakan problem sosial terkait dengan penilaian yang pada dasarnya subjektif dan juga dengan kondisi objektif. Eksistensi kondisi objektif dalam diri sendiri (yang disfungsional) belum cukup untuk dianggap sebagai problem sosial. Dalam model ini Fuller melihat problem bergerak melalui tahap kesadaran, penentuan kebijakan dan reformasi. C Wright Mill (1943) problem

sosial adalah mirip problem patologis dalam tubuh manusia. Becker (1963) dalam studi terhadap outsider (orang luar menyatakan bahwa problem sosial adalah akibat dari proses pelabelan (*labeling*) oleh satu kelompok terhadap aktifitas atau kondisi yang tidak di setujui atau di tentang oleh kelompok tersebut. Fokus Beacker bukan pada sebab dan akibat dari penyimpangan, tetapi bagaimana sebuah problem itu muncul dari proses politik tempat berlangsungnya kampanye para "*enterpreuner moral*" memberi cap sebuah kondisi problem melalu media massa.Selanjutnya Beckertd menyatakan untuk memahami problem sosial secara utuh kita harus tahu bagaimana cara sebuah problem-problem didefinisikan sebagai sebuah problem sosial. Selanjutnya Bergert dan Luckman (1975), realitas sosial adalah realitas yang dikonstruksi, bukan fakta objektif yang harus dikaji melalui pendekatan sosiologi pengetahuan. Bergert dan Luckman (1990 : XX), pemikiran dialiktikanya yang mampu mengsintesakan dimensi-dimensi dan subjektif dengan menyatakan bahwa manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi sebagai kenyataan objek yang mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif. Dengan kemampuan dialektikanya terdapat tesa, anti tesa dan sintesa sehingga Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.

Dalam suatu suatu masyarakat terdapat sistim pengendalian sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku anggota masyarakat dan sistem pengendalian ini tidak pernah ada yang berfungsi secara sempurna oleh karena

itu selalu terdapat sikap-sikap anggota masyarakat yang non konformis. Beberapa ciri penyimpangan menurut (Horton dan Hunt, 1993;191) mengemukakan beberapa ciri penyimpangan, antara lain :

1. Penyimpangan dapat di definisikan

Tidak ada satupun perbuatan penyimpangan berdiri sendiri. Suatu perbuatan yang disebut menyimpang bila mana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang. Penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perilaku tindakan. Dengan demikian penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat

2. Penyimpangan yang diterima dan yang ditolak.

Penyimpangan yang diterima biasanya orang yang menyimpang seperti orang jenius, suci, pahlawan yang dihormati dan dipuji. Penyimpangan yang ditolak adalah penyimpangan perilaku akibat melanggar hukum. Dalam banyak hal, studi terhadap perilaku menyimpang terhadap perilaku kriminal merupakan tujuan praktis studi sosiologi.

3. Penyimpangan yang relatif dan mutlak .

Pada masyarakat moderen kebanyakan orang tidak termasuk baik dalam kategori konformis seutuhnya maupun dalam kategori menyimpang sepenuhnya. Seorang menyimpang sepenuhnya akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Hampir semua orang normal sesekali melakukan

tidak menyimpang pada batas-batas tertentu. Hanya saja beberapa diantaranya lebih sering melakukan penyimpangan dan lebih tinggi kadar penyimpangannya, dan beberapa orang melakukan penyimpangan mereka lebih tersembunyi dari pada orang lain. Sampai batas-batas tertentu dapat dikatakan bahwa seorang penyimpang adalah orang yang melakukan penyimpangan secara terbuka oleh orang lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

4. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal

Budaya nyata dan budaya ideal terdapat perbedaan yaitu budaya ideal mencakup kepatuhan terhadap segenap peraturan hukum namun dalam kenyataannya tidak ada seorangpun yang patuh terhadap segenap peraturan hukum. Kesenjangan utama antara budaya ideal (apa yang diucapkan orang) merupakan masalah penting. Kesenjangan antara budaya ideal dan budaya nyata didasarkan pada landasan normatif yang dipegang secara tersirat dinyatakan secara tegas contoh masalah hubungan kelamin sebelum nikah atau tindak kejahatan tertentu.

5. Penyimpangan bersifat adaktif.

Penyimpangan merupakan suatu ancaman tetapi juga merupakan alat pemeliharaan stabilitas sosial. Disatu pihak, suatu masyarakat hanya dapat melakukan kegiatannya secara efisien bila mana terdapat ketertiban dan kepastian dalam kehidupan sosial. Bila mana terlalu banyak orang yang tidak berperilaku sebagai mana yang diharapkan, maka kebudayaan akan porak-poranda dan ketertiban sosial akan berantakan. Tata kelakuan akan

kehilangan kekuatan menekannya, sehingga nilai-nilai inti dimasyarakat akan menjadi rapuh. Para individu merasa tidak tenang dan menjadi bingung dalam masyarakat yang norma-normanya tidak lagi dijadikan pegangan. Hanya jika kebanyakan orang selalu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang mantap, maka masyarakat akan berfungsi secara efisien. Oleh karena itu perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial.

Menurut Hoton dan Hant (1993:195), ada beberapa teori penyimpangan dalam sosiologi yakni :

1. Teori Biologis, menilai faktor biologis sebagai penyebab dari sebagian besar penyimpangan.
2. Teori psikologis, menganggap bahwa ketidakmampuan menyesuaikan diri secara psikologislah yang merupakan penyebab penyimpangan,
3. Teori sosialisasi, menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati norma dan nilai-nilai yang dominan. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan khusus yang menyimpang.
4. Teori anomie, menyatakan bahwa masyarakat kompleks cenderung menjadi masyarakat tanpa norma, yang tidak memberikan pedoman jelas yang dapat di pelajari dan dipatuhi.
5. Teori reaksi masyarakat, teori ini biasa disebut teori pemberian cap (*labeling theory*) memusatkan perhatian pada para pembuat peraturan dan pelanggar peraturan. Pemberian cap menyimpang kepada seseorang

seringkali mengubah perlakuan masyarakat terhadap orang itu dan jaringan-jaringan hubungannya. Hal tersebut mendesak orang yang semula hanya melakukan penyimpangan primer, akhirnya melakukan penyimpangan sekunder sehingga seluruh gaya hidup orang itu diwarnai oleh penyimpangan semata.

6. Teori Konflik. Disini terdapat dua teori penyimpangan yakni teori konflik budaya adalah menilai penyimpangan diawali oleh adanya pertentangan norma antara berbagai kebudayaan khusus yang berlainan. Teori konflik kelas sosial melihat penyimpangan bermula dari adanya perbenturan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang berbeda.
7. Teori pengendalian, menghubungkan penyimpangan dengan lemahnya ikatan terhadap lembaga-lembaga dasar masyarakat seperti keluarga, mesjid/gereja, sekolah dan pekerjaan. Teori pengendalian memandang norma yang dihayati dan pemberian hukuman yang sistematis sebagai alat yang bermanfaat.

Setiap teori memiliki bukti-bukti yang menunjang tetapi tidak satupun yang mampu menjelaskan segala bentuk penyimpangan. Teori adalah sesuatu yang sangat penting, karena kebijakan pengendalian didasarkan pada teori.

C. Partisipasi Masyarakat

Konsep Partisipasi adalah konsep yang sangat luas pengertiannya dan sangat berkaitan dengan aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mubiarto dan Sartono Kartodirjo (dalam Suparjan dan Hembri

Suyatno, 2003:7) menyatakan bahwa seringkali pengertian partisipasi diinterpretasikan secara keliru seakan-akan rakyat memang harus mendukung atau ikut program-program pemerintah secara gratis dengan alasan program tersebut pada akhirnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian pada akhirnya proyek-proyek pembangunan yang memiliki anggaran tertentu kadang-kadang dapat diselesaikan melalui penghematan-penghematan. Makin banyak penghematan makin murah suatu proyek, dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat pada aras ini partisipasi lalu diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Eka Chadra (2005:242) dalam studi pustakanya tentang partisipasi menyimpulkan bahwa ada dua kategori konsep partisipasi yakni: (1) konsep partisipasi yang terbatas ruang lingkup penggunaannya, dan (2) konsep partisipasi yang luas. Selanjutnya, untuk bagian pertama dia menamakan partisipasi minimalis dan kedua partisipasi maksimalis. Sekurang-sekurangnya terdapat lima belas pengertian partisipasi antara lain partisipasi sebagai komoditi, upaya peningkatan kesadaran, hubungan dinamika kesalingpercayaan, penggantian struktur kuasa, alat pengawasan, metode akumulasi pengetahuan, aliran neo-kolonialisme, narasi besar baru pembangunan, paradigma baru pembangunan, pengalaman keagamaan, dan sebagai konsep politik (Cooke dan Uma Kotari, 2001:204-5)

Pengertian partisipasi yang diterima banyak pihak adalah suatu pengaturan yang mengisyaratkan warga masyarakat turut aktif dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan evaluasi program. Sejak tahun 70 an, partisipasi mempunyai arti dan diinterpretasikan dalam kaitannya dengan pembangunan. Beberapa pandangan mengenai partisipasi (UNDP, 1997:3), antara lain sebagai berikut:

”Partisipasi menyangkut hal pembangunan pedesaan. Partisipasi meliputi keterlibatan penduduk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, membangun manfaat program pembangunan dan usaha melibatkan mereka dalam setiap program”. (Cohen dan Uphoff, 1977).

“Partisipasi adalah usaha-usaha yang mengatur mengawasi sumber dan mengatur secara mantap institusi-institusi dalam situasi-situasi sosial dan menggerakkan kelompok dari luar dalam setiap pengawasan”. (Peores dan Stifel, 1979).

Selanjutnya (Paul, 1987) partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan dimana kelompok-kelompok klien yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan proyek pembangunan dengan suatu pandangan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang meliputi peningkatan pendapatan perorangan atau kepercayaan pada diri sendiri”.

“Partisipasi dapat dilihat sebagai suatu proses pemberdayaan, pandangan ini didasarkan pada pengakuan adanya perbedaan kekuatan politik dan ekonomi dari adanya perbedaan kelompok kelas sosial. Partisipasi disini mengharuskan organisasi-organisasi kaum miskin berbuat lebih kreatif, demokrasi, tidak tergantung dan percaya pada kemampuan diri sendiri” (Ghai, 1990).

Sedangkan menurut (*World Bank*, 1994) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu proses untuk mempengaruhi pada stakeholder dalam berinisiatif mengontrol, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka”.

Berdasarkan gambaran sifat dasar partisipasi tersebut diatas menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi didasarkan pada fakta interpretasi dan mata rantai dari yang mewakili perspektif pembangunan. Akan tetapi tidak semua interpretasi yang universal cocok di terapkan sebagai model partisipasi yang dapat di terapkan pada semua program pembangunan dari beberapa pengertian partisipasi tersebut diatas partisipasi merupakan instrumen yang menentukan strategi dan metodologi interferetasi. Cohen dan Uphoffs, lebih berpengaruh sebagai kunci dalam menunjang proyek partisipasi yang sedang berjalan mulai pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat dan evaluasi dengan demikian partisipasi adalah instrumen perubahan.

Pasaribu dan Simanjuntak, 1986:4) menyatakan bahwa jenis partisipasi terdiri dari partisipasi:

1. Partisipasi buah pikiran, yaitu partisipasi dalam bentuk anjangan, penyampaian pendapat, pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yaitu partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yaitu berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yaitu jenis partisipasi untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial yaitu kegiatan yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya dalam bentuk materi (uang dan barang) tetapi juga bisa dalam bentuk nonmateri.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi sangat tergantung pada kondisi sosial masyarakat setempat. Sumadjo, 2001:9) mengemukakan bahwa kunci yang sangat mempengaruhi seseorang berpartisipasi dalam suatu program pembangunan adalah:

1. Adanya kesadaran akan manfaat program bagi kehidupannya. Semakin besar manfaat yang akan diperoleh, semakin besar pula derajat partisipasinya, dan semakin panjang (berkelanjutan) manfaat tersebut di nikmati makin berkelanjutan pula partisipasinya. Dalam hal ini manfaat bisa berarti terpenuhinya kebutuhan dan bisa juga berarti terbebas dari ancaman tertentu.
2. Komunikasi yang efektif diantara para pelaku yang diharapkan berperan serta dalam program. Pola komunikasi yang interaktif yang lebih berpeluang besar mengandung konvergensi antara kepentingan berbagai pihak yang diharapkan ikut berperan serta dalam program tersebut.
3. Adanya kesukarelaan pihak yang berperan serta, artinya bukan karena paksaan maupun tekanan dari pihak lain dengan cara dan bentuk apapun. Makin besar objek partisipasi tersebut menimbulkan motivasi intrinsik makin besar pula derajat keikutsertaan seseorang.

Sedangkan Goldsmith dan Blustain (dalam Nderaha, 1990:12) membuat suatu kesimpulan bahwa masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat akan berkurang jika mereka tidak atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.

Mengingat permasalahan sosial kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas, hal ini terjadi karena merosotnya peranan dan fungsi keluarga. Adapun merosotnya fungsi keluarga antara lain meliputi yakni fungsi ekonomi semakin menurun, fungsi perlindungan semakin merosot, fungsi kasih sayang menurun, fungsi reproduksi makin kurang dan adanya hidup bersama tanpa nikah semakin meningkat.(Hoton dan Hunt, 1993:279-291-5)

Berdasarkan hal tersebut diatas peranan keluarga dalam pembinaan generasi muda tidak mungkin diharapkan lagi menjadi faktor penentu didalam menangani masalah anak dan remaja. Untuk itu diperlukan lembaga atau organisasi yang dapat menjadi peran pengganti fungsi keluarga. Salah satu aspek yang perlu ditumbuhkembangkan adalah modal sosial, karena modal sosial saat ini sudah mulai terkikis karena pengaruh perkembangan ekonomi masyarakat. Modal sosial ini dapat dijadikan landasan untuk membentuk

organisasi sosial untuk menangani berbagai permasalahan sosial di tingkat lokal. Organisasi sosial buatan, badan-badan berkelompok bertujuan sempit yang mencakup beberapa fungsi yang dulu dilayani keluarga dan komunitas dan sekolah (Coleman, 2009:808).

Erich Fromm (1985:262) seorang psikoanalisis Amerika yang menyatakan bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu mengarahkan anggotanya. Manusia hanya dapat menemukan arti hidup yang berlangsung singkat dan penuh bahaya, hanya kalau mau membaktikan dirinya bagi masyarakat

Keputusan Menteri Sosial RI, tahun 1980 Nomor : 40 tahun 1980 tentang organisasi sosial dimana ditegaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial baik pribadi maupun perkumpulan.

Tujuan dari pada organisasi sosial yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah melakukan kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada kemampuan orang khususnya kelompok rentang dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dalam : a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kebodohan kelaparan dan bebas dari kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang bereka perlukan,

dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Jamasy, (2004) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran, inisiatif dan motivasi, peningkatan sumber daya manusia (intelektual), peningkatan keterampilan dan program yang berkesinambungan untuk melakukan pergeseran sikap dan mental kearah yang lebih positif dan rasional.

Dalam penanganan permasalahan kenakalan remaja diperlukan strategi dan pendekatan pemberdayaan. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya, strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti mengaitkan orang dan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, Parsons (1994) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yakni mikro, mazzo dan makro.

1. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling manajemen stres, krisis intervensi tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien yaitu menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan dalam strategi

meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang di hadapinya.

3. Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pendekatan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997).

Strategi pemberdayaan bagi kelompok kenakalan remaja tujuannya agar para remaja berorientasi pada kecakapan hidup. Kecakapan hidup diperlukan bagi anak dan remaja agar mereka dapat memasuki lingkungan hidup dan norma-norma dimasyarakat, kemandirian, pengetahuan tentang sumber dan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja kemampuan tersebut membantu anak remaja menjauhkan mereka dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan yang meresahkan masyarakat.

Sumatri, (2004:21), menjelaskan kecakapan hidup dalam lima jenis yaitu:

1. Kecakapan mengenal diri sendiri (*personal skills*)
2. Kecakapan berfikir rasional (*thinking skills*)
3. Kecakapan Sosial (*social skills*)
4. Kecakapan akademik (*academic skills*)
5. Kecakapan Vokasional (*vocational skills*)

Sedangkan Hendricks (1999:17) menjelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup merujuk pada kemampuan individual yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Pendidikan kecakapan hidup dapat di klasifikasikan menjadi delapan yaitu : 1) kemampuan membuat keputusan, 2) kemampuan memanfaatkan sumber daya, 3) kemampuan berkomunikasi, 4) kemampuan menerima perbedaan 5) kemampuan memimpin, 6) kemampuan memasarkan keahlian, 7) kemampuan memilih gaya hidup sehat, dan 8) kemampuan bertanggung jawab pada diri sendiri.

Mengacu pada dua pendapat tentang kecakapan hidup diatas dikaitkan dengan kondisi pemberdayaan Kenakalan remaja di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang kota Makassar, dapat dirumuskan bahwa kecakapan hidup dalam konteks penelitian/kajian ini mencakup empat aspek yaitu: kecakapan pribadi dan sosial, kecakapan komunikasi, kecakapan kepemimpinan, dan kecakapan teknis/vokasional.

D. Kerangka Pikir

Pengembangan masyarakat adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai objek yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya di kembangkan. Organisasi sosial sebagai salah satu unsur pilar partisipasi masyarakat dapat di kembangkan sebagai wadah yang dimiliki masyarakat dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

Partisipasi merupakan aktifitas segenap unsur masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Dalam upaya meningkatkan peranan organisasi sosial dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat diperlukan suatu strategi penguatan partisipasi masyarakat. Apabila partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan anak dan remaja berperilaku nakal menguat maka hasil pemberdayaan kenakalan anak dan remaja akan lebih optimal. Dengan hasil pemberdayaan yang optimal, maka anak remaja yang berperilaku nakal dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Pemberdayaan kenakalan remaja melalui penguatan dan pengembangan organisasi-organisasi sosial diarahkan pada suatu kondisi keberdayaan anak yang lebih menekankan pada kecakapan hidup. Kecakapan

hidup diperlukan bagi remaja agar siap memasuki lingkungan hidup dimasyarakat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan potensi diri melalui kecakapan komunikasi sikap yang sesuai dengan norma-norma dimasyarakat, kemandirian, pengetahuan tentang sumberdaya dan keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan di pasaran kerja. Kemampuan tersebut akan membantu dirinya dalam lingkungannya dan akan memiliki perilaku produktif. Perilaku produktif anak dan remaja akan menjauhkan dari perilaku yang menyimpang. Kecakapan hidup dalam penelitian ini meliputi aspek : kecakapan pribadi dan sosial, kecakapan komunikasi, kecakapan kepemimpinan, dan kecakapan vokasional.

Partisipasi masyarakat dilandasi oleh konsep sinergi artinya masyarakat akan ikut berpartisipasi apabila mendapatkan manfaat dari partisipasi yang diberikan oleh karena itu dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga harus di imbangi dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari partisipasi yang diberikan.

Untuk memudahkan kerangka pikir ini dibuat bagan kerangka fikir yang disajikan pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Alur Pikir

